



Sekretariat DPRD
Kota Balikpapan

RANCANGAN AKHIR



RENCANA KERJA TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan 2025 akan menjadi bagian dari rancangan dokumen perencanaan Rancangan Awal Renja yang sudah disusun sebelumnya. Penyusunan Rancangan Akhir Renja ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025.

Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025 sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Balikpapan, 11 Juli 2024
Sekretaris DPRD Kota Balikpapan



PEMERINTAH KOTA
SETWAN
BALIKPAPAN

ARFIANSYAH, S.T, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	25
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	26
3.3. Program dan Kegiatan.....	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	39
BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH	42
BAB VI PENUTUP.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.....	11
Tabel 2 : Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	16
Tabel 3 : Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2025	20
Tabel 4 : Tabel T-C.32 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025.....	24
Tabel 5 : Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	28
Tabel 6 : Rancangan Akhir RKPD 2025	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan rumah tangga DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan nomor 50 Tahun 2016. Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD tersebut, diperlukan adanya rencana kerja tahunan yang memberikan arah dan acuan yang jelas dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun untuk itu Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menyusun Renja sebagai salah satu acuan pelaksanaan kegiatan.

Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dan merupakan suatu bagian dari rangkaian sistem perencanaan pada pemerintahan daerah yang memuat rencana program dan kegiatan untuk Tahun 202 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Adapun Rencana kerja dan pendanaan mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun 2025 mengacu pada beberapa produk perundang-undangan, sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lambang Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga negara RI Tahun 2015 No 08 Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5670);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
10. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Balikpapan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

b. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2025 agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan yang mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Mengemukakan Pengertian Ringkas tentang Renja SKPD keterkaitan antar Renja SKPD dengan Dokumen RKPD Renstra SKPD serta Tindak lanjutnya Proses Penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang Peraturan Perundang undangan serta peraturan Daerah Lainnya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: Jumlah program dan jumlah kegiatan. Serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tahun 2025.

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan tentang kebijakan serta program inovasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam mendukung terlaksanannya tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja perangkat daerah.

BAB VI PENUTUP

Meliputi hal hal yang perlu ditambahkan sebagai kesimpulan atas dokumen Perencanaan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggaraan fasilitasi tugas pokok DPRD, antara lain dukungan fasilitasi dalam administrasi kesekretariatan dan rumah tangga DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan nomor 01 Tahun 2022. Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD tersebut, diperlukan adanya rencana kerja tahunan serta evaluasi rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Evaluasi Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan suatu bagian dari rangkaian sistem perencanaan pada pemerintahan daerah yang memuat antara lain capaian kinerja rencana kerja terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dokumen evaluasi rencana kerja ini disusun dengan mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Realisasi dan Evaluasi Program/kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Keberhasilan pencapaian target kinerja mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD, sehingga diharapkan anggota DPRD dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanannya kepada masyarakat.

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan telah menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Untuk pemenuhan terhadap sasaran tersebut, maka pada tahun 2023 telah dilakukan pembiayaan (APBD) untuk pelaksanaannya, yaitu melalui 2 (dua) Program yang menghasilkan outcome dan 15 (lima belas) Kegiatan yang menghasilkan output dengan anggaran murni sebesar Rp 151.154.695.210,- dan realisasi sebesar Rp 122.318.615.483,.

Berdasarkan laporan realisasi fisik dan keuangan dapat dijabarkan bahwa telah terlaksana dengan baik program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan pada tahun anggaran 2023 dengan capaian fisik sebesar 97,72% dan capaian keuangan sebesar 81%. Adapun pematangan dalam capaian fisik Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan masih memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan dimasa yang akan datang. Selain itu, capaian realisasi keuangan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan perlu memperhatikan asas efisiensi dan efektifitas dalam keberlangsungan kegiatan-kegiatan pendukung urusan penunjang tugas dan fungsi DPRD.

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah. Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Target kinerja digunakan sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian output yang diinginkan.

Secara ringkas gambaran evaluasi hasil Renja untuk indikator program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator : IKM Internal Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil :

Dari target shasil survey internal kepuasan masyarakat (IKM) Internal sebesar 72, dan yang tercapai sebesar 85,47 atau 118% dari target yang hendak dicapai.

Pada program ini terdapat 10 (sepuluh) kegiatan, antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Nilai SAKIP

Evaluasi Hasil : Nilai Sakip sebesar 64,86 dengan predikat B Yaitu “Baik”

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi Keuangan Daerah

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 90,62 dengan predikat A yaitu “Sangat Baik”

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi BMD Pada Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil : Kegiatan ini tidak dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 85,66 dengan predikat B yaitu “Baik”

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi Keuangan Daerah

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 85,38 dengan predikat B yaitu “Baik”

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja : IKM Layanan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 84,92 dengan predikat B yaitu “Baik”

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja : IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 84,49 dengan predikat B yaitu “Baik”

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja : IKM Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 83,62 dengan predikat B yaitu “Baik”

9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Indikator Kinerja : IKM Kegiatan Layanan Keuangan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 73,82 dengan predikat C yaitu “Kurang Baik”

10. Layanan Administrasi DPRD

Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi DPRD

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 71,54 dengan predikat C yaitu “Kurang Baik”

2. Program Pelaksanaan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator : Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi

Evaluasi Hasil :

Dari target 100 % yang tercapai adalah 83% hal ini dikarenakan mengikuti rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan DPRD.

Pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan, antara lain :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Indikator Kinerja : Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 60%

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Indikator Kinerja : Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 100%

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Kinerja : Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 85%

4. Peningkatan Kapasitas DPRD

Indikator Kinerja : Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 75%

5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Indikator Kinerja : Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 100%

6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Indikator Kinerja : Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan dan Pengawasan Kode Etik DPR

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 100%

7. Pembahasan Kerjasama Daerah

Indikator Kinerja : Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 50% dikarenakan kegiatan ini tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2023

8. Fasilitasi Tugas DPRD

Indikator Kinerja : Persentase Fasilitasi Tugas DPRD

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 90%

Adapun dalam evaluasi rencana kerja ini, terdapat kegiatan yang mencapai target, melampaui ataupun yang tidak mencapai target. Oleh karena itu, berikut adalah faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian target kinerja.

Faktor Pendorong :

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara DPRD Kota Balikpapan dengan unit kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan;
2. Komitmen dari seluruh stakeholder di lingkungan Sekretariat DPRD dalam mencapai Sasaran;
3. Koordinasi yang sinergis antara unit kerja di Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan seluruh kegiatan;
4. Ketersediaan SDM aparatur yang berkompeten;
5. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai pada Sekretariat DPRD dalam menunjang efektivitas pelayanan fasilitasi Anggota DPRD.

Faktor Penghambat :

1. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan masih belum terlaksana secara optimal;
2. Adanya beberapa penyesuaian kebutuhan terhadap fasilitasi DPRD ataupun mengikuti kebutuhan kegiatan dan jadwal kerja DPRD;
3. Penyusunan target pada Renstra dinilai terlalu tinggi, sehingga perlu di evaluasi kembali penentuan target pada setiap kegiatan.

Tabel 1
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah :
SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
4	UNSUBSIDIARIS												
4	02												
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH	78	65,85	72	85,47	119%	74	225,32	2,89	
4	02	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74	64,59	68	64,59	95%	70	199,18	2,69

4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78	20	72	90,62	126%	74	184,62	2,37
4	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78	84	72	85,66	119%	74	243,66	3,12
4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	78	8	72	85,38	119%	74	167,38	2,15
4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78	1	72	84,92	118%	74	159,92	2,05
4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78	5	72	84,49	117%	74	163,49	2,10
4	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78	4	72	83,62	103%	74	161,62	2,07
4	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	78	71,43	72	73,82	99%	74	219,25	2,81
4	02	01	2.16	Layanan Administrasi DPRD	IKM Layanan Administrasi DPRD	78	50	72	71,54	99%	74	195,54	2,51

4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PRESENTASE TERPENUHINYA FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	80%	72,1	74	83	112%	76	231,1	288,88
4	02	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	100	100	60	60%	100	260	260,00
4	02	02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terlaksananya Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	100	100	100	100%	100	300	300,00
4	02	02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	51,82	100	85	85%	100	236,82	236,82
4	02	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	75	100	75	75%	100	250	250,00
4	02	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	80	100	100	100%	100	280	280,00
4	02	02	2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Persentase Fasilitas Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	100	100	100	100%	100	300	300,00

4	02	02	2.07	Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100%	0	100	50	50%	100	150	150,00
4	02	02	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	100%	83,33	100	90	90%	100	273,33	273,33

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menguji indikator yang disesuaikan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, pada saat ini adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagai fasilitator kegiatan DPRD, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan berdasarkan Indikator Kinerja pada Renstra 2021-2026 indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Nilai Reformasi Birokrasi
3. Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD

Namun, seiring berjalannya pelaksanaan kinerja instansi terdapat peraturan yang mengubah indikator kinerja perangkat daerah. Adanya perubahan indikator kinerja ini dikarenakan terdapat indikator Nilai Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD sudah tidak lagi dilakukan perhitungan kembali untuk periode berjalan sehingga tidak bisa menjadi target pengukuran kinerja sebagaimana sesuai dengan yang tercantum dalam surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Oleh karena itu, untuk memberikan penguatan terhadap Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 diperlukan penetapan perubahan sasaran strategis sebagai acuan dalam indikator kinerja utama yang menjadi sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD
3. Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD

Pengukuran tingkat capaian Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah :
SEKRETARIAT DPRD

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN SEKRETARIAT DPRD TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	72	74	76	78					Merupakan Indikator Renstra 2021- 2026
			Nilai Reformasi Birokrasi	27	28	29	30	n/a	-	-	-	Merupakan Indikator Renstra 2021- 2026
			Nilai Sakip Sekretariat DPRD	-	64,85	64,95	72,9	72,86	-			IKU Perubahan
			Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	70	72	74	76	101%	-	100%	100%	Merupakan Indikator Renstra 2021- 2026

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

1. Efisiensi penggunaan anggaran dan hasil negosiasi melalui proses pengadaan barang dan jasa.
2. Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dan fasilitasi yang dilaksanakan sangat tergantung dengan agenda Pimpinan dan Anggota Dewan serta Alat Kelengkapan.
3. Dinamika kegiatan Dewan yang sangat dinamis sehingga seringkali terjadi perubahan agenda kegiatan Dewan sewaktu-waktu.
4. Dinamika politik yang berkembang di DPRD sulit diprediksi secara pasti.
5. Kesibukan dalam pembahasan anggaran dan Peraturan Daerah menyebabkan beberapa jadwal kegiatan Dewan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sehingga berakibat pada tidak terserapnya anggaran.
6. Beberapa target kinerja kegiatan pelaksanaannya yang perlu ada penyesuaian dengan kebutuhan riil yang berkembang.

Dalam perjalanan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tentu saja ada kendala yang dihadapi, namun beberapa upaya telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu dengan :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan, bimbingan teknis dan konsultasi;
- b. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
- c. Memperbarui dan meningkatkan sarana prasarana pendukung secara kualitas sehingga mendukung kondusifitas kerja DPRD Kota Balikpapan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, untuk perencanaan kegiatan dan anggaran kedepannya diusahakan memperhatikan baik realisasi keuangan maupun hasil yang dicapai di tahun tahun sebelumnya. Hanya saja kesulitan di Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan kegiatan sangat tergantung dengan Dewan sehingga ada beberapa kegiatan yang telah direncanakan sesuai tata kala tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dimaksudkan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan kepada anggota DPRD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja Sekretariat DPRD dapat ditingkatkan lebih efektif dan efisien.

Permasalahan-permasalahan yang strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Kelembagaan dan Organisasi

Kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang diatur melalui Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini memerlukan penyesuaian kedepannya sehingga dapat meningkatkan daya dukung terhadap fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;

2. Dinamika sosial politik yang berkembang, adanya masa transisi keanggotaan DPRD periode baru sehingga berpengaruh pada perencanaan kinerja alat-alat kelengkapan DPRD yang kemudian turut mempengaruhi pada capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun masa transisi tersebut;
3. Tugas utama Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai fasilitasi / pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD;
4. Dukungan sarana fasilitas gedung kantor DPRD;
5. Adanya aturan-aturan baru yang mendukung pelaksanaan tugas namun membutuhkan pemahaman aturan serta waktu dalam melakukan penyesuaian.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Sekretariat DPRD, maka fungsi dan tugas Sekretariat DPRD terkait erat dengan pencapaian misi ke-5 yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3
T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah :
SEKRETARIAT DPRD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		5	6	7	9	10	11		12	13
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	BALIKPAPAN	IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH	74	Rp 77.754.836.034	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	BALIKPAPAN	IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH	74	Rp 94.999.214.112	
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP	70	Rp 49.533.498	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP	70	Rp 60.000.000	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74	Rp 4.496.048.380	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74	Rp 5.934.104.000	
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	74	Rp -	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	74	Rp -	
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74	Rp 470.568.232	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74	Rp 588.660.000	

6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74	Rp	16.954.033.968	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74	Rp	27.819.898.046
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	Rp	990.669.961	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	Rp	998.250.000
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74	Rp	5.475.928.212	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74	Rp	6.885.000.000
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	Rp	1.824.483.846	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	Rp	5.500.000.000
10	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Balikpapan	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	74	Rp	37.313.197.746	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Balikpapan	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	74	Rp	40.713.302.066
11	Layanan Administrasi DPRD	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi DPRD	74	Rp	10.180.372.192	Layanan Administrasi DPRD	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi DPRD	74	Rp	6.500.000.000
12	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	BALIKPAPAN	PRESENTASE TERPENUHINYA FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	76	Rp	38.114.994.966	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	BALIKPAPAN	PRESENTASE TERPENUHINYA FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	76	Rp	52.367.000.000

13	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	Rp	9.623.436.649	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	Rp	11.400.000.000
14	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Balikpapan	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	Rp	3.137.121.545	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Balikpapan	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	Rp	6.650.000.000
15	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Balikpapan	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	Rp	3.962.679.846	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Balikpapan	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	Rp	4.850.000.000
16	Peningkatan Kapasitas DPRD	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100	Rp	6.046.693.034	Peningkatan Kapasitas DPRD	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100	Rp	10.252.000.000
17	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	Rp	7.017.245.560	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	Rp	12.000.000.000
18	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	Rp	990.669.961	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	Rp	680.000.000

19	Pembahasan Kerjasama Daerah	Balikpapan	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100	Rp	330.223.320	Pembahasan Kerjasama Daerah	Balikpapan	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100	Rp	635.000.000
20	Fasilitas Tugas DPRD	Balikpapan	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	100	Rp	7.006.925.050	Fasilitas Tugas DPRD	Balikpapan	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	100	Rp	5.900.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 4
Tabel T-C.32
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah:

SEKRETARIAT DPRD

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan visi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan “Meningkatkan kualitas dan Efektifitas Fasilitasi dan Fungsi DPRD Kota Balikpapan“ serta dengan memperhatikan Misi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yaitu :

1. Menyelenggarakan pelayanan prima dan memfasilitasi sarana dan prasarana guna peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD
2. Menyelenggarakan Pelayanan yang memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan.
3. Melaksanakan Tertib administrasi sesuai dengan Peraturan dan ketentuan untuk mendukung akuntabilitas akuntabilitas kinerja Setwan dan Anggota DPRD.

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, maka tujuan Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Renja Sekretariat DPRD disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan dan dapat mencapai target kinerja yang diharapkan.

Adapun sasaran dari tersusunnya Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan ini, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah Meningkatnya Kepuasan DPRD Kota Balikpapan terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang tepat sasaran maka harus didukung kinerja yang maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

serta Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengatur Program, Kegiatan sampai dengan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD;

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang diberi pendanaan, antara lain :
 1. Jumlah Program sebanyak 2 (dua) Program, Jumlah Kegiatan sebanyak 17 (tujuh belas) Kegiatan, Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 64 (enam puluh empat) Sub Kegiatan.
 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kota Balikpapan, dikarenakan seluruh program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan merupakan program dan kegiatan yang sifatnya memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Balikpapan
 3. Pendanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan bersumber dari APBD Kota Balikpapan
- c. Terdapat ketidaksesuaian antara rancangan awal pendanaan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :
 1. Rencana pendanaan pembangunan Gedung kantor Sekretariat DPRD;
 2. Rencana kebutuhan pendanaan pembelian/ pemeliharaan aplikasi;
 3. Rencana kebutuhan pendanaan Kerjasama dengan media online;
 4. Rencana kebutuhan bimtek DPRD;
 5. Rencana kebutuhan koordinasi konsultasi tenaga ahli;
 6. Rencana kebutuhan koordinasi konsultasi 7 (tujuh) fraksi;
 7. Rencana kebutuhan koordinasi konsultasi pengawasan DPRD.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5

T-C.33

**Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Balikpapan**

Nama Perangkat Daerah :
**SEKRETARIAT
DPRD**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	9	10
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	02				SEKRETARIAT DPRD							
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH	BALIKPAPAN	76	93.193.000.000	APBD	78	114.904.900.000
4	02	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Balikpapan	72	60.000.000	APBD	74	60.000.000
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Balikpapan	1	15.000.000	APBD	1	15.000.000
4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Balikpapan	3	15.000.000	APBD	3	15.000.000

4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Balikpapan	1	15.000.000	APBD	1	15.000.000
4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Balikpapan	3	15.000.000	APBD	3	15.000.000
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	76	5.934.104.000	APBD	78	5.830.314.600
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	30	5.934.104.000	APBD	30	5.830.314.600
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	76	603.663.891	APBD	78	358.302.075
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Balikpapan	30	103.663.891	APBD	30	25.000.000
4	02	01	2.05	0006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Balikpapan	30	500.000.000	APBD	30	333.302.075
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	76	24.912.425.352	APBD	78	22.514.529.593
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	23	70.000.000	APBD	23	219.615.000

4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Jumlah Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	10	3.000.000.000	APBD	10	1.800.000.000
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Balikpapan	15	1.452.000.000	APBD	15	1.597.200.000
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Balikpapan	5	2.050.000.000	APBD	5	1.500.000.000
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Balikpapan	2	350.000.000	APBD	2	602.126.000
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Balikpapan	4	400.000.000	APBD	4	658.845.000
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	295	4.021.000.000	APBD	295	4.423.943.593
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	4	13.569.425.352	APBD	3	11.712.800.000

4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	76	997.620.000	APBD	78	1.098.075.000
4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Balikpapan	1	997.620.000	APBD	5	1.098.075.000
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	76	8.129.475.000	APBD	78	8.025.930.000
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jenis Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang Disediakan	Balikpapan	4	1.500.000.000	APBD	4	1.171.280.000
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	5	1.150.000.000	APBD	5	2.196.150.000
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balikpapan	4	5.479.475.000	APBD	4	4.658.500.000
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	76	5.500.000.000	APBD	78	5.457.100.000

4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Balikpapan	29	1.500.000.000	APBD	29	1.464.100.000
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Balikpapan	2	4.000.000.000	APBD	2	3.993.000.000
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Balikpapan	76	40.695.711.757	APBD	78	54.313.033.732
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Balikpapan	45	39.525.102.066	APBD	45	53.140.213.732
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Balikpapan	5	949.742.050	APBD	45	880.000.000
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Balikpapan	45	220.867.641	APBD	45	292.820.000
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	IKM Layanan Administrasi DPRD	Balikpapan	76	6.360.000.000	APBD	78	9.927.115.000
4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Balikpapan	10	600.000.000	APBD	10	219.615.000

4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Balikpapan	7	260.000.000	APBD	7	880.000.000
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Balikpapan	200	1.500.000.000	APBD	270	5.500.000.000
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Balikpapan	10	4.000.000.000	APBD	10	3.327.500.000
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PRESENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD YANG TERFASILITASI	BALIKPAPAN	78%	56.807.000.000	APBD	80%	47.656.624.540
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Balikpapan	100%	11.400.000.000	APBD	100%	9.203.435.523
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Balikpapan	5	50.000.000	APBD	5	51.000.000
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Balikpapan	40	3.100.000.000	APBD	40	4.425.315.523

4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang-undangan yang diselenggarakan dalam satu tahun	Balikpapan	5	6.200.000.000	APBD	4	2.342.560.000
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Balikpapan	5	1.400.000.000	APBD	4	2.164.560.000
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Balikpapan	1	650.000.000	APBD	1	220.000.000
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	Balikpapan	100%	6.650.000.000	APBD	100%	3.000.000.000
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Balikpapan	1	1.300.000.000	APBD	1	500.000.000
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Balikpapan	1	1.300.000.000	APBD	1	500.000.000
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Balikpapan	1	1.800.000.000	APBD	1	500.000.000
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Balikpapan	1	1.300.000.000	APBD	1	500.000.000
4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Balikpapan	2	500.000.000	APBD	2	500.000.000

4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Balikpapan	1	450.000.000	APBD	1	500.000.000
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Balikpapan	100%	4.850.000.000	APBD	100%	21.800.000.000
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Balikpapan	48	750.000.000	APBD	48	2.725.000.000
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Balikpapan	24	750.000.000	APBD	24	2.725.000.000
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Balikpapan	48	750.000.000	APBD	48	2.725.000.000
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Balikpapan	48	750.000.000	APBD	48	2.725.000.000
4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Balikpapan	24	750.000.000	APBD	24	2.725.000.000

4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Balikpapan	1	500.000.000	APBD	1	2.725.000.000
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Balikpapan	1	300.000.000	APBD	1	2.725.000.000
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Balikpapan	1	300.000.000	APBD	1	2.725.000.000
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	Balikpapan	100%	14.692.000.000	APBD	100%	6.299.653.796
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Balikpapan	45	0	APBD	5	220.000.000
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Balikpapan	45	4.000.000.000	APBD	90	1.148.139.017
4	02	02	2.04	0003	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Balikpapan	35	9.000.000.000	APBD	12	3.300.000.000
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Balikpapan	5	940.000.000	APBD	6	875.814.779

4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Balikpapan	7	315.000.000	APBD	6	275.000.000
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Balikpapan	4	250.000.000	APBD	48	275.000.000
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	Balikpapan	1	187.000.000	APBD	1	205.700.000
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Balikpapan	100%	12.000.000.000	APBD	100%	3.847.035.221
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Balikpapan	1	8.000.000.000	APBD	1	181.500.000
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Balikpapan	3	4.000.000.000	APBD	3	3.665.535.221
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Persentase Fasilitasi Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Balikpapan	100%	680.000.000	APBD	100%	663.000.000
4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Balikpapan	1	350.000.000	APBD	1	300.000.000
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Balikpapan	1	330.000.000	APBD	1	363.000.000

4	02	02	2.07		Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	Balikpapan	100%	635.000.000	APBD	100%	5.225.000.000
4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Balikpapan	2	275.000.000	APBD	2	302.500.000
4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Balikpapan	2	360.000.000	APBD	2	220.000.000
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	Balikpapan	100%	5.900.000.000	APBD	100%	2.321.000.000
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Balikpapan	1	450.000.000	APBD	1	495.000.000
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	Balikpapan	16	4.000.000.000	APBD	16	1.650.000.000
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Balikpapan	12	650.000.000	APBD	12	176.000.000
4	02	02	2.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pansus	Terlaksanannya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Balikpapan	5	800.000.000	APBD		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan. Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan.

Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dari kebijakan yang telah dibuat. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Adapun rancangan akhir Rencana kerja program dan kegiatan serta pagu indikatif Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6
Rancangan Akhir RKPD

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BALIKPAPAN	IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH	76	Rp 93.193.000.000
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP	72	Rp 60.000.000
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76	Rp 5.934.104.000

4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	76	Rp	-
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76	Rp	603.663.891
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	76	Rp	24.912.425.352
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76	Rp	997.620.000
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76	Rp	8.129.475.000
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76	Rp	5.500.000.000
10	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Balikpapan	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	76	Rp	40.695.711.757
11	Layanan Administrasi DPRD	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi DPRD	76	Rp	6.360.000.000
12	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	BALIKPAPAN	PERSENTASE TERPENUHINYA FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	78	Rp	56.807.000.000
13	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	Rp	11.400.000.000
14	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	Rp	6.650.000.000
15	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	Rp	4.850.000.000

16	Peningkatan Kapasitas DPRD	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100	Rp 14.692.000.000
17	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	Rp 12.000.000.000
18	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	Rp 680.000.000
19	Pembahasan Kerjasama Daerah	Balikpapan	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100	Rp 635.000.000
20	Fasilitasi Tugas DPRD	Balikpapan	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	100	Rp 5.900.000.000

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sendiri adalah perpanjangan tangan Pemerintah Kota, sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas utama yakni memfasilitasi tugas fungsi dan wewenang DPRD, sehingga erat kaitannya keaktifan kinerja DPRD didukung oleh Sekretariat DPRD. Begitupun juga kinerja Sekretariat selaku OPD bergantung kepada kinerja seluruh Anggota DPRD yang terbagi fungsi kerjanya melalui Alat Kelengkapan Dewan atau yang biasa disebut dengan AKD yang terdiri dari Pimpinan, Komisi, Badan dan Panitia Khusus. Pola kerja DPRD yang terencana dan sistematis akan mempengaruhi performa kualitas tugas fasilitasi Sekretariat DPRD.

Dalam memfasilitasi kinerja anggota DPRD tantang terberat Sekretariat DPRD adalah pada perbedaan regulasi dan budaya kerja yang menjadi acuan bagi anggota DPRD, serta factor politis yang secara hukum diluar kendali pegawai pemerintah. Berikut gambaran kebijakan dan regulasi yang mengatur tata kerja antara ASN dan Non ASN dan DPRD dilingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Selain dari perbedaan yang fundamental pada tata cara dan budaya kerja terdapat juga perbedaan pada perencanaan kerja antara DPRD dengan Pemerintah Kota baik secara kelembagaan maupun individu. DPRD belum memiliki rencana kerja yang berbasis target pada pencapaian kinerja, waktu dan atribut penting lainnya, tidak seperti instansi maupun pegawai pemerintah yang terikat regulasi dan juga perjanjian kinerja.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Salah satunya dengan melakukan terobosan-terobosan inovatif untuk pencapaian target kinerja dan tujuan pembangunan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga inovasi daerah menjadi bagian penting dari pembangunan. Beberapa yang menjadikan prinsip dasar pengembangan inovasi daerah meliputi cara berpikir strategis dan konsisten dengan kerangka jangka panjang, strategi Inovasi Daerah yang menjadi agenda prioritas daerah dan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah, Strategi inovasi daerah merupakan kebijakan strategis peningkatan daya saing daerah, berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka pada ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah, dan menetapkan tujuan yang jelas serta capaian yang rasional. Cara pandang ini memberikan sandaran dan kerangka kerja bagi kita secara sendiri maupun bersama tentang pentingnya pendekatan sistemik/holistik, ketidaklinieran sifatnya, dan pentingnya interaksi, kemitraan dan sinergitas berbagai elemen sistem serta pentingnya peran pemerintah

untuk menghasilkan koherensi berbagai kebijakan terkait yang biasa disebut dengan kebijakan inovasi.

Dalam upaya mewujudkan Visi Pemerintah Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman, dan mewujudkan misi ke 1 Pemerintahan yang baik maka diperlukan sebuah strategi peningkatan layanan pemerintahan berbasis digital, modern, adaptif, mengikuti era dan perkembangan zaman yang di mulai dari masing – masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada DPRD Kota Balikpapan dalam menjalankan Fungsi dan kewenangannya (Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Penganggaran) maka dilaksanakan pembahasan antara Pimpinan dan Anggota DPRD dengan seluruh elemen Sekretariat DPRD Kota Balikpapan untuk merumuskan isu strategis yang menjadi fokus penguatan pemberian layanan dan fasilitasi DPRD dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, dengan hasil sebagai berikut.

1. Pelayanan dan Fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan masih bersifat Konvensional;
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM sehingga pelayanan dan fasilitasi sangat lambat, tidak efektif dan efisien serta tidak transparan;
3. Pendokumentasian, pengarsipan dokumen penting belum berjalan dengan baik;
4. Belum optimalnya sinergitas antar lembaga;
5. Belum tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi antara Eksekutif, Legislatif dan masyarakat.

Sistem Informasi Agenda kerja (SIAK) DPRD merupakan inovasi dalam bentuk web base yang kedepannya akan dikembangkan dalam bentuk aplikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi agenda kerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan, sehingga dapat memonitor progress dan proses sampai dengan evaluasi kegiatan. Stakeholder utama yakni peserta yang terkait dalam setiap agenda kegiatan DPRD dapat menggunakan SIAK DPRD. Hal ini bermanfaat bahwa pengguna SIAK DPRD dapat mengakses kapanpun, dimanapun melalui link yang ditautkan pada seluruh platform social media milik DPRD. Dengan mengakses link yang telah digunakan, dan memasukan kode sandi user dari tiap jenis agenda kerja, stakeholders dapat memantau proses, progress serta dokumen hasil agenda kegiatan DPRD.

SIAK merupakan sebuah terobosan yang dihadirkan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam rangka menciptakan sebuah layanan yang berbasis digital guna memberikan layanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Terobosan ini juga merupakan sarana dalam rangka membangun

harmonisasi antara eksekutif dengan legislatif yang muaranya mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat Kota Balikpapan.

Dalam konsep besar SIAK merupakan perwujudan dari rencana implementasi RPJMN Pemerintah Republik Indonesia dalam Agenda prioritas ke 8 yang lebih di kenal sebagai Nawacita ke 2 yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya. Sejalan dengan itu Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya. Sejalan dengan itu Pemerintah Kota Balikpapan dalam RPJMD telah menetapkan Visi Kota Balikpapan sebagai Kota Terkemuka dan Kota Modern dengan Misi ke 1 adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai Misi ke 1 Pemerintah Kota Balikpapan yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik maka di butuhkan strategi dan terobosan untuk memulai dan mengubah sistem layanan pemerintahan dari konvensional menjadi layanan digitalisasi. Sistem Digital ini merupakan alat dalam rangka menghadirkan layanan yang memenuhi prinsip – prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*). Prinsip tersebut yaitu layanan cepat, tepat, efektif dan efisien serta transparan.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan serta sebagai bahan penyusunan KUA PPAS Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Adapun Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan melalui perencanaan kegiatan yang berkualitas. Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dan sebagai instrument pengukuran capaian kinerja organisasi. Pelaksanaan penyusunan serta penetapan dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai perencanaan kegiatan yang berkualitas.

Akhir kata, semoga Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dan segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

Balikpapan, 11 Juli 2024
Sekretaris DPRD Kota Balikpapan



ARFIANSYAH, S.T, M.Si